

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfitra. 2018. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana. Jakarta: Raih Ada Sukses.
- Bo'a, Fais Yonas. 2002. UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen. Yogyakarta: Balai Pustaka Edisi 3.
- C.S.T, Kansil, Cristin S.T. Kansil. 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang. Jakarta: Pradnya Paaramita.
- Djokosutono. 1966. Ilmu Negara. Jakarta: Balai Buku Ikhtiar.
- Ghofar, Abdul. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju. Jakarta: Kencana.
- H.A Djazuli, "Fiqh Siyasah Cet III", (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007). 2007. Fiqh Siyasah Cet III. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Harmaily, Moh kusnardi dan. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UI.
- HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Huda, Ni'Matul. 2006. Politik Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C.S.T. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Rineke Cipta.
- Kaharuddin. 2016. Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Media Hukum.

- Kartanegara, Satochid. 2009. Hukum Pidana Bagian Ke-II. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Maslul, Syaiful. n.d. Pengaturan Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Dalam RUU GAAR.
- Manan, Bagir. 1998. Kekuasaan Prerogatif. Bandung.
- Marpaung, Lintji Anna. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- Nevey Varida Ariani, dkk. 2021. Perlukah hak prerogatif presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi) Dengan Undang-Undang. Jakarta: BALITBANGKUMHAM.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat .
- Putra, M. Ishaq Dwi. 2020. Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia. Jakarta: Indonesiabaik.id.
- Zain, S. Badudu dan Sutan Mohammat. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zakaria, M. 2019. Presiden jokowi tanda tangani keppres amnesti baiq nuril.

Skripsi Dan Artikel :

- Heri Suandi Banurea, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Hasbi Iswanto & Ida Keumala Jeumpa, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din

Minimi)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 (1), Februari 2018.

Miatu Alfaini, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pertimbangan DPR RI Dalam Pemberian Amnesti". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Mery Hartanto, "Hak Presiden Memberikan Abolisi Dalam Perspektif Siyasah". Skripsi Fakultas Syariah Universits Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Siti Rakhma Mary Herwati, "Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan". Artikel Sajogyo Insitute, 2019.

Sumber Daring :

"2 Amnesti Jokowi untuk Korban UU ITE". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/19353511/2-amnesti-jokowi-untuk-korban-uu-ite> pada 10 Juli 2021 19:35 WIB.

KBBI. Abolisi. Diakses dari <https://artikbbi.com/abolisi/> pada 12 januari 2018

UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Nomor 63

Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1998

Keputusan Presiden No. 157-160 Tahun 1999

Undang-Undang No 2 Tahun 2018

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 22 Tahun 2005

